

BAB V **KESIMPULAN**

Penelitian dan studi pustaka telah dilakukan untuk mendeskripsikan Dinamika Ekonomi Pabrik Gula Sumberharjo Pemalang pada Tahun 1985-2005. Adapun yang menjadi bagian dari penelitian ini adalah: 1). Sejarah perkembangan kepemilikan pabrik gula Sumberharjo dan perkembangan industri gula Indonesia, 2). Dinamika ekonomi pabrik gula sumberharjo dan eksistensi buruh-buruh pabrik, 3). Dampak krisis moneter 1997-1998 terhadap eksistensi pabrik gula Sumberharjo.

1). Pabrik gula Sumberharjo mengalami beberapa kali perubahan bentuk perusahaan dalam status kepemilikan atau penguasaan. Pabrik yang memulai produksi tahun 1912 ini, awalnya dimiliki oleh Belanda yaitu NHM (*Nederlandche Handels Maatschappij*) yang berkedudukan di Belanda. Wakil cabang administrasi NHM di Indonesia berkedudukan pada kota Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, pabrik gula Sumberharjo diambil alih dan dikuasai oleh pemerintah Jepang. Pabrik gula Sumberharjo kemudian dijadikan pabrik untuk memproduksi semen sehingga kerusakan tidak dapat terhindarkan.

Sesudah Indonesia merdeka, pabrik gula Sumberharjo pindah tangan kepada pemerintah RI. Selanjutnya dengan adanya Konferensi Meja Budar (KMB) yang terjadi antara Indonesia dan Belanda, maka pada tahun 1950 pemerintah Indonesia menyerahkan pengelolaan pabrik gula Sumberharjo kepada Belanda kembali sehingga dapat berproduksi lagi dan mulai memperluas

areal tanaman tebu. Perkembangan selanjutnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, maka pada tanggal 10 Desember 1957 diadakan pengambilalihan semua perusahaan perkebunan milik Belanda ke tangan Indonesia dan dibentuk Perusahaan Perkebunan Baru yang berkedudukan di Surabaya. Pabrik gula Sumberharjo termasuk wilayah unit I Semarang dengan nama PPN Baru Perusahaan Gula Sumberharjo. Pada tahun 1963 pemerintah mengadakan reorganisasi menurut Lembaran Negara No.2 Tahun 1963 dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni (BPU PPN dan Karung Goni) dengan kantor pusat di Jakarta. Pabrik gula Sumberharjo termasuk dalam PPN Gula Jawa Tengah II disebut PPN Gula Sumberharjo.

Reorganisasi kembali dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur status kepemilikan pabrik gula Sumberharjo pada tahun 1981, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 11/1981 tentang pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI yang berkedudukan di Solo. Hingga untuk masa sekarang berdasarkan SK Menteri Perkebunan No.259/kmk/.016/1996, secara administratif pabrik gula Sumberharjo pengelolaannya di bawah Direksi PTPN IX (Persero) yang berkedudukan di Surakarta. Untuk perkembangan industri gula Indonesia berkembang sesuai masanya, menurut AT Birowo membagi perkembangan industri gula menjadi 7 periode, yaitu: zaman VOC samapai tahun 1830, masa tanam paksa, masa industri gula bebas dan maju pesat, masa depresi hingga tahun 1940, zaman Jepang, masa kurun waktu tahun 1945-1950, zaman setelah ambil alih hingga sekarang. Lahan dan produksi

pabrik gula Sumberharjo dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang dinamis, namun semakin meningkatnya tahun semakin berkurang jumlahnya.

2). Berbagai kebijakan yang berkaitan industri pergulaan nasional telah dikeluarkan pemerintah baik sebelum masa krisis moneter (1985-1997) maupun setelah krisis moneter (1998-2005). Kebijakan-kebijakan pemerintah tahun 1985-sekarang dapat dikategorikan dalam tiga rezim tersebut meliputi: Rezim Kebijakan Stabilitas (1971-1996), Rezim Perdagangan Bebas (1997-2001), dan terakhir adalah Rezim Kebijakan Terkendali (2002-sekarang).

Dari sisi kebijakan produksi dan kebijakan input, kebijakan yang paling signifikan dari pemerintah pada periode stabilitas adalah kebijakan TRI. Pada MTT 1996/1997 Peningkatan lahan pabrik gula Sumberharjo cukup besar dan mempunyai kontribusi paling banyak terhadap luas keseluruhan areal tanaman tebu. Peningkatan lahan yang diusahakan sendiri oleh pabrik gula tersebut disebabkan adanya upaya dari pihak pabrik gula untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku tebu akibat dari penurunan luas lahan tebu yang diusahakan petani.

Pada kebijakan perdagangan bebas, Pada tahun 1997 kebijakan dari pemerintah lebih dikenal dengan istilah demonopoli gula yang mulai berlaku tahun 1998. Pada tahun 1998 ini, telah dilakukan pembebasan tata niaga gula putih yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Pada kondisi ini produksi gula putih dalam negeri semakin berkurang dan impor dari berbagai negara semakin meningkat. Langkah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan pemangkasan regulasi tertuang dalam Kepres no 19 tahun 1998

tentang perubahan atas keputusan presiden terkait badan urusan logistik sebagaimana telah diubah dengan kepres no 45 tahun1997.

Banyaknya gula import yang masuk ke pasaran Indonesia menyebabkan pabrik-pabrik gula lokal kalah saing. Aksi demo dari buruh PG Sumberharjo yang tergabung dalam aksi buruh-buruh pabrik gula se-Jawa berlangsung kompak. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan impor, dengan membatasi importir hanya menjadi importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT). Kebijakan ini tertuang dalam Kepmenperindag No.643/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002. Era ini merupakan periode dimulainya rezim pengendalian impor yaitu pada kebijakan ketiga.

Hingga kini, di usia pabrik yang telah mencapai 100 tahun ini pabrik gula Sumberharjo masih tetap eksis menyumbangkan peran penting pada sektor perekonomian di desa-desa sekitar pabrik. Contohnya yaitu desa Banjarmulya, Wanamulya, Tambakrejo dan lain-lainnya yang berada di dekat wilayah kerja pabrik gula Sumberharjo sehingga banyak masyarakat sekitar menjadikan lahannya menjadi lahan pertanian untuk komoditas tebu dan sebagian yang tak mempunyai lahan memilih jalan sebagai buruh-buruh pabrik gula Sumberharjo sebagai mata pencaharian mereka.

Mengenai buruh-buruh pabrik gula Sumberharjo, Secara garis besar karyawan Pabrik Gula Sumberharjo dibagi menjadi dua yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap dikelompokkan menjadi karyawan pimpinan atau karyawan *staff* dan karyawan pelaksana (bulanan). Sedangkan

karyawan tidak tetap terdiri dari buruh/ pekerja kampanye, buruh harian lepas, buruh borongan. Pekerja kampanye merupakan pekerja musiman yang didatangkan dan dipekerjakan hanya dalam masa giling saja, kemudian perkerja KKWT (Karyawan Kerja Waktu Tertentu) atau bisa disebut harian lepas juga pada dasarnya adalah buruh musiman tetapi modelnya menggunakan sistem kontrak, artinya hanya bekerja saat dibutuhkan saja. Buruh borongan adalah pekerja tidak tetap yang bekerja untuk menyelesaikan suatu hal terdiri dari buruh panggul gula yang berjumlah 35 orang, buruh tebangan 1700 orang. Buruh tanaman 8493 orang, supir 92 orang san warung yang berjumlah 100 orang. Buruh-buruh pabrik gula Sumberharjo tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) sebagai bentuk eksistensi atau peran buruh.

3). Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 berubah menjadi krisis multidimensional dan membawa dampak pada bidang-bidang yang lain seperti pertanian dan membawa dampak pada eksistensi pabrik gula Sumberharjo. Pabrik mengalami kerugian besar, sehingga pada tahun 1998-1999 mengalami keadaan berat karena krisis dan hampir menyebabkan pabrik akan ditutup. Buruh-buruh pabrik mampu menyuarakan aspirasinya lewat SP-Bun, tak jarang protes dan demo diterapkan mereka sebagai usaha untuk tetap eksis menuntut kesejahteraan. Pasca krisis keadaan pabrik juga belum bisa pulih benar, bahkan pabrik tetap saja merugi seperti keadaan di tahun 1997 dan peningkatan biaya produksi yang begitu tajam sejak tahun 1998. Keadaan ini membuat buruh-buruh pabrik bergejolak dan menyuarakan keluhan mereka karena kehidupan mereka tergantung pada kondisi pabrik gula Sumberharjo.